

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021 telah disusun.

Laporan keuangan ini disusun sebagai implementasi dari amanah pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dan peraturan-peraturan perundangan yang lainnya yang menyangkut tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara dan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan ini disampaikan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dimana menggambarkan perbandingan antara Anggaran tahun 2021 dengan Realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja-belanja, Laporan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 berkenaan dengan Aset, kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal pelaporan, dan catatan atas Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, Antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan Akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas Daerah

Penyajian Neraca, Aset, dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis Akruwal yaitu Pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Demikian Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2021 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Pasangkayu pada umumnya.

Pasangkayu, 31 Januari 2022

Pengguna Anggaran

KARTINI, SH, M.P. WP,

NIP.19840109 200312 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sedangkan tujuan catatan atas Laporan keuangan (CaLK) adalah menyajikan Informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos Laporan Keuangan selama satu priode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Menggabarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 Dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan –LO, beban dan surplus/deficit operasional dan suatu yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenal perubahan ekuitasi yang terdiri dari ekuitasi awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan ekuitasi akhir.

b.Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitasi dana pada tanggal pelaporan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporsn Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitasi dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan atau oleh dan dari kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor
7. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daeran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;

20. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016
21. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016;

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola satu kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Periode 1 Januari 2021 S/d 31 Desember 2021, yang terdiri dari atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Unsur Laporan Keuangan
- 1.4.Sistematika Penulisan Catatan atas laporan

BABII.EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas pelaporan keungan daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi pemerintahan

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan pos-pos Neraca

BAB VI. PENUTU

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 *Ekonomi makro*

Dalam Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2 *Kebijakan Keuangan*

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pasangkayu adalah dibidang aset daerah. Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi pelayanan administrasi perkantoran dan umum serta pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 *Program Pencapaian Target Kinerja*

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2021 , Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten mamuju utara mempunyai 5 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang di laksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatu;
- d. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- f. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah;
- g. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir;
- h. Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- i. Program Pengembangan Budidaya perikanan
- j. Program Pengembangan Perikanan tangkap
- k. Program pengembangan system penyuluh perikanan
- l. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- m. Program pengembangan sumber daya manusia pelaku mina bisnis kelautan dan perikanan.
- n. Program Pengembangan Sarana dan prasarana perikanan tangkap
- o. Program pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
- p. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di wilaya pesisir.
- q. Program pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- r. Program Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan,peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil perikanan
- s. Program pengembangan kawasan tehnis Perikanan Budidaya

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pasangkayu memperoleh Anggaran Pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp 171.000.000,00 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara Keseluruhan sebesar Rp11.147.702.442.00 yang terdiri dari.

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan	171.000.000,00
	Jumlah	171.000.000,00
2	Belanja Operasi	9.846.941.022,00
3	Belanja Modal	1.300.761.420,00
JUMLAH		11.147.702.442.00

Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Perikanan dan kelautan Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran Rp 2021	Realisasi (RP) 2021	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan			
	-Pendapatan Asli Daerah	525.000.000,00	171.000.000,00	32,57
	Jumlah	525.000.000,00	171.000.000,00	32,57
2	Belanja			
	-Belanja operasi	9.846.941.022,00	9.688.333.730,00	99,39
	-Belanja Modal	1.300.761.420,00	1.292.140.000,00	99,34
JUMLAH		11.147.702.442,00.	10.980.473.730,00	98,34

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah pada dinas Kelautan dan Perikanan Sampai Akhir tahun 2021 sebesar Rp171.000.000,00 Atau 32,57% Persen dari Anggaran (Melebihi target Target) :

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2021 Sebesar Rp 10.980.473.730,00 Atau 98,50% yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%
1	2	3	4	
	Belanja			
1	Belanja Operasi	9.846.941.022,00	9.688.333.730,00	98,39
	Belanja Pegawai	2.418.985.108,00	2.418.985.108,00	100,00
	Belanja Barang Jasa	985.246.489,00	881.967.997,00	89,52
	Belanja Hibah	6.442.709.425,00	6.387.380.625,00	99,14
2	Belanja Modal	1.300.761.420,00	1.292.140.000,00	99,34
	Belanja Peralatan Mesin	52.142.920,00	44.150.000,00	84,67
	Belanja Jalan , irigasi dan Jaringan	1.148.618.500,00	1.148.190.000,00	99,96
	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	99,80
	Total	11.147.702.442,00	10.980.473.730,00	98,50

3.2 Hambatan dan kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan akan kinerja dan dan penganggaran yang masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai, belum adanya gudang tempat persediaan ATK dan penyimpanan barang milik negara ,serta banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dinas kelautan dan perikanan dengan instansi- instansi yang ada baik dalam dan luar daerah belum optimal

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten mamuju utara. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan –satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis actual, dimana pada tahun-tahun sebelumnya disusun dan disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 58 Tahun 2015.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan –LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitasi. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas sebaliknya bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, atau dibayar.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitasi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penerapan basis akrual pertama kalinya, juga menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitasi.

1. Pendapatan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitasi dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Ekuitas

Ekuitasi dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitasi dineraca berasal dari saldo akhir ekuitasi pada laporan perubahan Ekuitasi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. *Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja*

a. *Pendapatan*

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 525.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 171.000.000,00 atau (32,57 %) Jauh dari target.

Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2021 sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran 2021 (Rp)	Realiasa (Rp)	
			2021	2020
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	525.000.000,00	171.000.000,00	481.545.000,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	525.000.000,00	171.000.000,00	481.545.000,00
3	Pendapata Retribusi Daerah	525.000.000,00	171.000.000,00	481.545.000,00
Jumlah		525.000.000,00	171.000.000,00	481.545.000,00

b. *Belanja*

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal. Dalam Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Alokasi anggaran tahun 2021 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu sebesar **Rp11.147.702.442,00** yang terbagi kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran sebesar **Rp2.418.985.108,00** dan pada Belanja Langsung sebesar **Rp8.728.717.334,00** Pertanggal 31 Desember 2021, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp 10.980.473.730,00** atau sebesar **98,50%** dari total anggaran yang ada. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Belanja Operasional

Belanja operasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2021 sebesar **Rp9.688.333.730,00** Dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2021	2020
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	2.418.985.108,00	2.418.985.108,00	2.767.631.679,00
2	Belanja Hibah	6.442.709.425,00	6.387.380.625,00	
3	Belanja Barang	985.246.489,00	881.967.997,00	10.915.034.067,00
Jumlah		9.846.941.022,00	9.688.333.730,00	13.682665.746,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Modal Peralatan dan mesin dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan Realisasi tahun 2021 **Rp 1.292.140.000,00** Rincian belanja Modal tersebut, sebagai berikut

No	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi (Rp) 2021	
				%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.142.920,00	44.150.000,00	84,67
2	Belanja Modal dan Jalan Irigasi dan Jaringan	1.148.618.500,00	1.148.190.000,00	99,96

3	Belanja Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	99,80
Total		1.300.761.420,00	1.292.140.000,00	99,34

5.2 *Penjelasan Laporan Operasional*

a. *Pendapatan –LO*

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan –LO pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021, yaitu : **Rp153.360.000,00**

Rincian Pendapatan LO tersebut :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.360.000,00	481.545.000.00
2	PENDAPATAN TRANSFER LO	0,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO	0,00	0,00
Jumlah		153.360.000,00	481.545.000.00

b. *Beban*

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga

Selama Tahun 2021 Beban pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu adalah sebesar **Rp9.754.266.330,00** dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar **Rp 15.040.719.792,00** Mengalami Penurunan senilai **Rp (5.286.453.462,00)** atau **(35,15 %)**

Beban Operasi

1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 2.418.985.108,00** Apabila di bandingkan beban pegawai pada tahun 2020 yaitu sebesar **Rp 2.767.631.679,00** mengalami Penurunan senilai **Rp 348.646.571,00** Atau (12,60%)

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 880.987.997,00** dan pada Tahun 2020 **Rp 4.368.824.412,00** mengalami Penurunan senilai **Rp (3.487.836.415,00)** atau (79,83%)

3. Beban Hibah

Beban hibah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Pada Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 6.387.380.625,00** apabila di bandingkan beban hibah pada tahun 2020 yaitu sebesar **Rp 6.546.209.655,00** mengalami penurunan senilai **Rp (158.829.030,00)** Atau (2,43%)

4. Beban Lain lain

Beban lain lain pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 0,00** dan pada Tahun 2020 **Rp 11.201.441** mengalami Penurunan senilai **Rp (11.201.441)** Atau (100%)

Rincian Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan / Penurunan	%
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPAT AN – LO	153.360.000,00	481.545.000,00	(328.185.000,00)	(68,15)
2	BEBAN				
3	Beban Pegawai-Lo	2.418.985.108,00	2.767.631.679,00	(348.646.571,00)	(12,60)

4	Beban Barang dan Jasa	880.987.997,00	4.368.824.412,00	(3.488.249.515,00)	(79,84)
5	Beban Hibah	6.387.380.625,00	6.546.209.655,00	(158.829.030,00)	(2,43)
	Beban Lain lain	0,00	11.201.441,00	(11.201.411,00)	(100,00)
6	Beban Penyusutan mesin	578.036.696,00	735.355.590,00	(157.318.894,00)	(21,39)
7	Beban Penyisihan Piutang	66.912.600,00	16.052.190,00	50.860.410,00	316,84
8	Beban Penyusutan Gedung bangunan	347.134.999,00	344.262.707,00	2.872.292,00	0,83
9	Beban Penyusutan jalan dan irigasi	308.350.760,00	251.182.118,00	57.168.642,00	22,76
Jumlah		10.987.375.685,00	15.040.719.792,00	(4.053.344.19700)	(26,95)

6. Sulplus /Defisit Laporan Operasional

Dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021, berdasarkan realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan senilai **Rp 153.360.000,00** Dan realisasi beban Tahun 2021 sebesar **Rp9.754.266.330,00** dan realisasi beban tahun 2020 **Rp 15.040.719.792,00**,

Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu mengalami Suplus/ dari operasi sebesar **Rp(5.286.453.462,00)** Atau **(35,15%)**

Defisit ini terjadi di karenakan Pendapatan lebih kecil dari belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit –LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 15.132.527.247,00** - Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2021 Adalah sebesar **Rp 15.107.900.791,00-**

2. Surplus/ Defisit

Surplus / Defisit – LO Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 badalah sebesar **Rp (8.926.342.685,00)** sedangkan pada Tahun 2020 adalah sebesar **Rp (14.559.174.792,00)** Ini yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/ Defisit-LO

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 merupakan koreksi koreksi yang langsung menambah / Mengurangi Ekuitas pada Tahun 2021. Koreksi-koreksi tersebut terdiri dari koreksi ekuitas lainnya senilai **Rp0.00**

Rincian Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
		2021
1	2	3
1	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :	
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00
2	Selisi Revaluasi Aset Tetap	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
4	Mutasi Aset Tetap	0,00
5	Koreksi Terhadap Utang	0,00
6	Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi	0,00
Jumlah		0.00

4. Kewajiban Untuk di Konsultasikan

Kewajiban untuk di konsolidasikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp8.901.800.730,00** dan pada Tahun 2020 **Rp 14.233.947.666,00**

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 15.107.985.291,00** Sedangkan Tahun 2020 sebesar adalah **Rp 15.132.527.246,00**

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Aset Lancar	95.268.300.00	178.512.300,00
2	Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
3	Aset Tetap	14.049.171.150,00	13.990.553.605,00
4	Dana Cadangan	0.00	0.00
5	Aset Lainnya	963.461.341.00	963.461.341.00
6	Kewajiban Jangka pendek	0,00	
Jumlah Aset		15.107.900.791,00	15.132.527.246,00

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	0,00	0,00

4	Kas Lainnya	0,00	0,00
5	Setara Kas	0,00	0,00
6	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
7	Piutang Pendapatan	178.662.000,00	195.402.000,00
8	Piutang Lainnya	15.167.000,00	15.167.000,00
9	Penyisihan Piutang	(98.973.800,00)	(32.056.700,00)
10	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
11	Persediaan	413.100,00	0,00
Jumlah		95.268.300,00	178.512.300,00

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu per. 31 Des 2021 sebesar **Rp 0.00**.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per. 31 Desember 2021 **Rp 0,00**

Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu.

Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per. 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Setara Kas

Saldo pada Setara Kas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31. Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Investasi Jangka Pendek

Saldo pada Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 **Rp. 0,00**

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 178.662.000,00**

Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 **Rp 15.167.000,00**

Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 **Rp (98.973.800,00)**

Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban yang dibayar dimuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.0,00**

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021, sebesar **Rp 413,00**

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0.00**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,0**

2. Aset Tetap

Aset Tetap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	10.394.314.400,00	10.361.248.150,00
3	Gedung dan Bangunan	6.727.296.535,00	6.727.296.535,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.277.739.140,00	5.129.549.140,00
5	Aset tetap Lainnya	99.800.000,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(9,449.978.925,00)	(8.227.540.220,00)
Jumlah		14.049.171.150,00	13.990.553.605,00

Tanah

Saldo Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,00**

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 10.394.314.400,00**

Gedung dan Bangunan

Saldo Gudang dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 6.727.296.535,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021, sebesar **Rp 6.277.739.140,00**

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 99.800.000,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,00**

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar, **Rp(9,449.978.925,00)**

3. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,00**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	963.461.341,00	963.461.341,00
4	Aset Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah		963.461.341,00	963.461.341,00

Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Tagihan Jangka Panjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 **Rp 0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021, sebesar **Rp 0,00**

Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021, sebesar **Rp. 963.461.341,00**

Aset Lain-Lain

Saldo Aset dan Lain-Lain pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 0,00**

A. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2	Utang Bunga	0.00	0.00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
5	Utang Beban	0.00	0.00
6	Utang Jangka Pendek lainnya	0,00	0.00
Jumlah		0,00	0.00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (LKB)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (LKB) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Utang Bunga

Saldo Utang Bunga pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember tahun 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai Saldo Pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Dimuka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0.00**

Utang Belanja

Saldo Utang Beban pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021, sebesar **Rp. 0.00**

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021, sebesar **Rp 0,00**

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Utang dalam Negeri	0.00	0.00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0,00**

Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 **Rp. 0,00**

a. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Ekuitas	15.107.900.791,00	15.132.527.246,00
Jumlah		15.107.900.791,00	15.132.527.246,00

Nilai Saldo pada Ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 sebesar **Rp15.107.900.791,00** dan pada tahun 2020 sebesar **Rp15.132.527.246,00**

b. Kewajiban dan Ekuitas Dana

Kewajiban dan Ekuitas Dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu.

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Kewajiban dan Ekuitas	15.107.900.791,00	15.132.527.246,00
Jumlah		15.107.900.791,00	15.132.527.246,00

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun Anggaran 2021 ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan SKPD tiap akhir tahun anggaran. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021, telah di susun dengan berdasar kepada peraturan undangan yang berlaku.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 pada anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 dengan penyerapan anggaran sebesar **98,50%** dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada Saldo Kas Bendahsara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2021 adalah **Rp.98 0,00**
4. Neraca SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu tahun 2021, menggambarkan posisi Keuangan yakni posisi Aset, kewajiban dan Ekuitas dana. Per 31 Desember 2021, pada Pos Aset Tetap telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan Aset yang Ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini di susun berdasarkan penggunaan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021.

Dengan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu yang dibuat dan dilaporkan per 31 Desember 2021. Laporan ini disampaikan sebagai laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan, Laporan Keuangan ini dapat menjadi bahan acuan semua pihak dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pasangkayu yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabel sesuai dengan yang diamankan dalam tata kelola Good Governance.

Sekian dan Terima Kasih.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu Yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2021Sebagaimana terlampir,Adalah Tanggungjawab Kami.

Laporan Keuangan Tersebut disusun berdasarkan system Pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran,posisi keuangan dan catatan laporan keuangan secara layak serta sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Pernyataan Ini kami buat dan Untuk dipergunakan Seperlunya.

Pasangkayu 31 Januari2022

Kepala Dinas

KARTINI, SH,M.P.WP,

NIP.19840109 200312 2 006